BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. Dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Komunikasi Dalam kebijakan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, telah dikomunikasikan kepada semua pelaksana kebijakan , namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipersepsikan sama oleh semua pelaksana kebijakan. karena komunikasi yang masih sedikit belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya cara penyampaian informasi yang masih kurang berjalan dengan semestinya.
2. Sumber Daya Dalam kebijakan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari sumber daya manusia dari badan tersebut. Sumber daya manusia yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi yang handal, yaitu karena ditunjang dari pendidikan yang tinggi.
3. Disposisi Dalam Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung telah berjalan cukup baik. cukup baiknya disposisi ini dapat dilihat dari: komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis sub bagian kelembagaan dan badan kepegawaian Pemerintah Daerah telah memberikan hal yang baik kepada satuan kerja melalui penempatan jabatan dalam menciptakan akuntabilitas publik kepada Pemerintah Kota Bandung.
4. Struktur Birokrasi Dalam Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas-tugasnya sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Norma-norma, aturan-aturan bagi para pelaksana kebijakan sudah di taati

dengan baik. Hal ini terlihat dari berjalannya kebijakan tersebut dengan cukup baik.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Komunikasi Dalam Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung melalui Implementasi Kebijakan Penempatan Pegawai Negeri Sipil harus dapat dilakukan dengan lebih jelas dengan melakukan komunikasi yang lebih aktif.
2. Sumber Daya Dalam Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Dalam Implementasi Kebijakan Penempatan Pegawai diharapkan agar berjalan lebih baik untuk melaksanakan Penempatan Jabatan.
3. Disposisi Dalam Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung harus lebih meningkatkan sifat dan karakteristiknya kembali. Karena dalam prakteknya kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis lebih diutamakan.
4. Struktur Birokrasi Dalam Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung harus lebih meningkatkan pola-pola hubungan dan menaati peraturan yang ada untuk dapat menciptakan pegawai yang berkarakter tinggi.
5. Bagi semua pegawai negeri sipil (PNS) harus bekerja secara maksimal agar memperoleh jabatan yang lebih baik sekaligus masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.